

TAHUN  
2024

# LAPORAN SURVEY

## INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) TRIWULAN I



JANUARI - MARET 2024

Pengadilan Negeri  
Metro Kelas IB

APLIKASI SISUPER DIRIJEN BADILUM

**PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB KOTA  
METRO PROVINSI LAMPUNG  
PERIODE JANUARI - APRIL 2024**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**1.1. LAPORAN SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI  
KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN  
2.1. DI PENGADILAN NEGERI METRO  
KELAS IB**

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi

Nomor 14 Tahun 2017

&

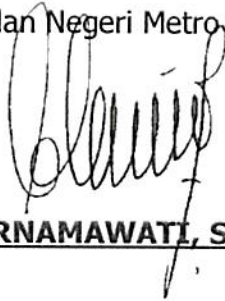
SK Direktur Jendral Badan Peradilan Umum

Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021

Disahkan di Metro

Pada Hari Senin, 29 April 2024

Ketua  
Pengadilan Negeri Metro Kelas IB



**VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H.**

Koordinator Survey



**Lia Puji Astuti, S.H.**

**LAPORAN**

**HASIL PELAKSANAAN  
SURVEI PERSEPSI KORUPSI  
PADA  
PENGADILAN NEGERI METRO  
KELAS IB**

**TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan .....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja .....	3
<b>BAB II</b> .....	5
<b>METODOLOGI</b> .....	5
2.1. Metode Penelitian .....	5
2.2. Populasi Dan Sampel .....	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis .....	6
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control .....	6
2.5. Teknik Analisis Data .....	7
2.6. Tahapan pelaksanaan.....	8
<b>BAB III</b> .....	10
<b>INDEKS PERSEPSI KORUPSI</b> .....	10
3.1. Profil responden.....	10
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator .....	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan .....	18
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan .....	19
<b>BAB IV</b> .....	21
<b>PENUTUP</b> .....	21
4.1. Kesimpulan.....	21
4.2. Rekomendasi .....	21

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.2. Latar Belakang**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2016 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

### **1.4. Landasan Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

## **1.5. Rencana Kerja**

### **1.4.1. Persiapan**

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana  
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
  - a. Kuesioner.
  - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
  - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  - a. Jumlah Responden.
  - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal  
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

### **1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data**

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

#### **1.4.3. Metode Survei**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (Empat kali dalam satu tahun).



## **BAB II**

### **METODOLOGI**

#### **2.2. Metode Penelitian**

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

#### **2.3. Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Jumlah sampel diambil berdasarkan table sampel *Morgan dan Krejcie*.

**Tabel 1 Sampel Morgan dan Krejcie**

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367

#### **2.4. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

#### **2.5. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control**

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data

dilaksanakan dengan aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada Ditjen Badilum dan Peradilan di Bawahnya. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

## **2.6. Teknik Analisis Data**

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

**2.7. Tahapan pelaksanaan**

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

**Tabel 1**

**Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas**



**Tabel 2**

**Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi**

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Hadiah
7	Biaya Tambahan
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

**Tabel 3**  
**Nilai Persepsi**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

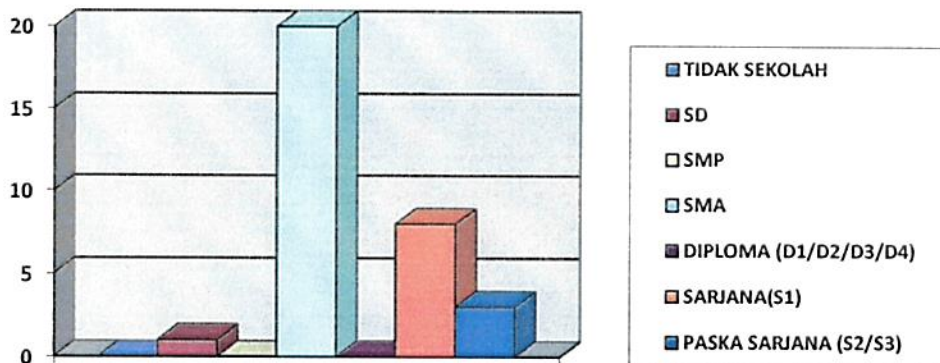
**BAB III**  
**INDEKS PERSEPSI KORUPSI**

**3.1. Profil responden**

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar Dasar dan Menengah.

**Tabel 4.**  
**Tingkat pendidikan responden**



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa hasil survey Indeks Persepsi Koruspsi di Pengadilan Negeri Metro adalah sebagai berikut :

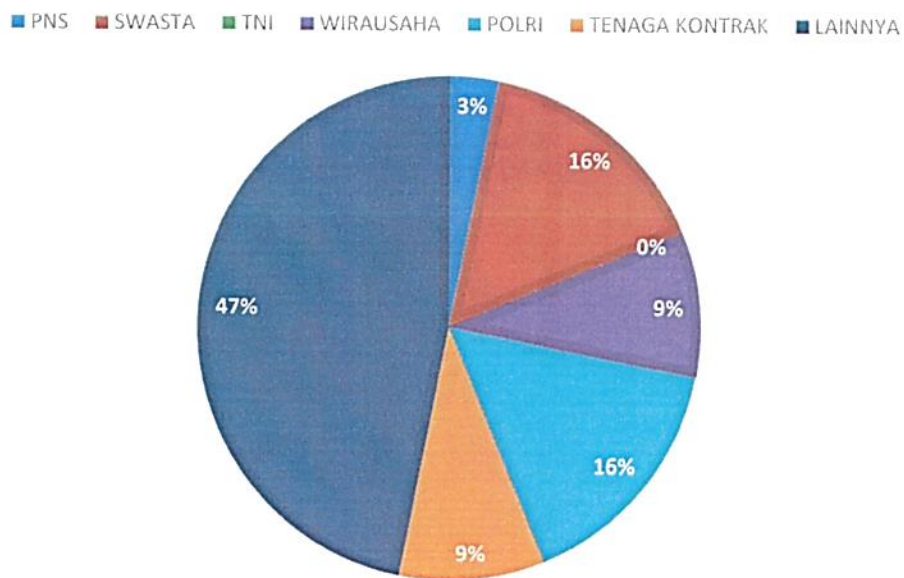
1. Responden yang memilih **Tidak Sekolah** sebesar 0
2. Responden yang memilih **SD** sebesar 1
3. Responden yang memilih **SMP** sebesar 0
4. Responden yang memilih **SMA** sebesar 20
5. Responden yang memilih **Diploma** sebesar 0
6. Responden yang memilih **Sarjana** sebesar 8
7. Responden yang memilih **Pasca Sarjana** sebesar 3

### 3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 47% responden pengguna layanan **Satuan Kerja pada pengadilan** memiliki pekerjaan sebagai lainnya.

**Tabel 5.**

**Jenis pekerjaan responden**



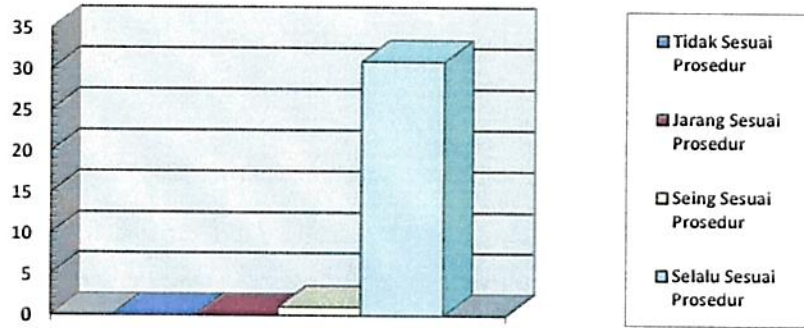
## 3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

### 3.2.1. Indikator Prosedur Pelayanan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator ini menunjukkan hasil pada index 3,969, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja **Satuan Kerja pada pengadilan** sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Tabel 9.

**Indeks pada indikator Indikator Prosedur Pelayanan**



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

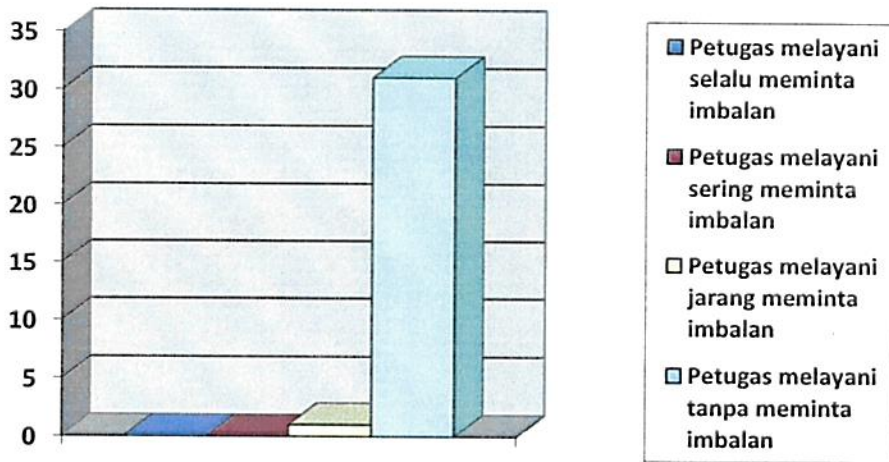
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **3,969**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja **Satuan Kerja pada pengadilan** bersih dari Penyalahgunaan Jabatan

Tabel 10.

**Indeks pada penyalahgunaan jabatan**

***Buat grafik statistik***





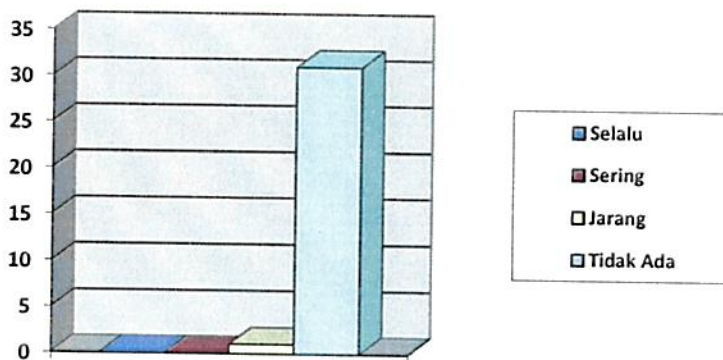
### 3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index **3,369**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan **tidak ada yang menjual pengaruh di satuan kerja.**

**Tabel 11.**

**Indeks pada indikator menjual pengaruh**



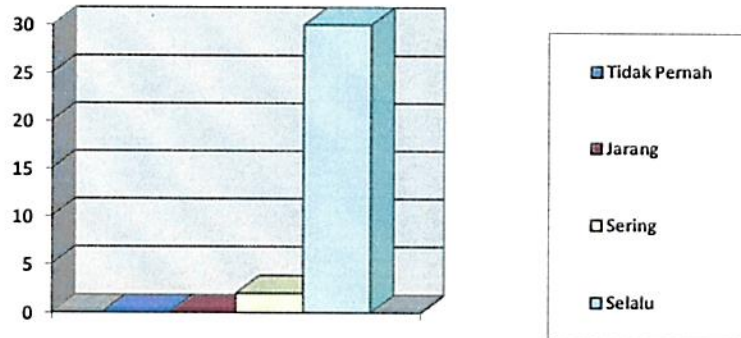
### 3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **3,938**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada **pengadilan besaran biaya secara transparan diumumkan di website dan papan pengumuman**

**Tabel 12.**

**Indeks pada indikator transparansi biaya**



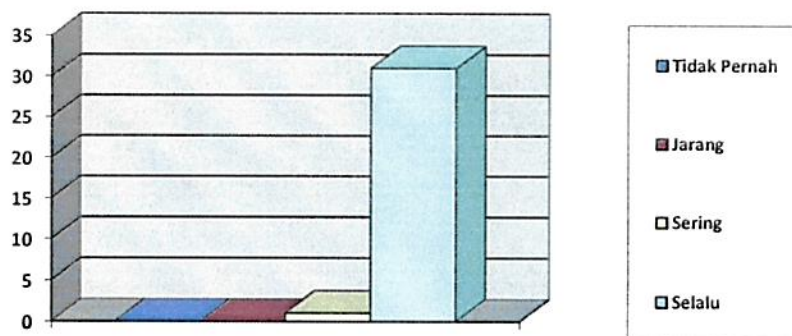
**3.2.5. Indikator Transaksi Rahasia**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index **3,969**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak ada transaksi rahasia

**Tabel 13.**

**Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia**



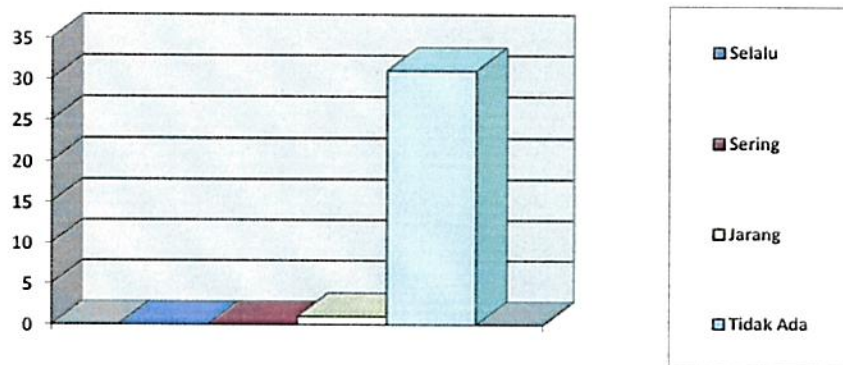
### 3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index **3,969**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan **pada pengadilan tidak menerima hadiah dari pihak manapun**

**Tabel 15.**

**Indeks pada indikator hadiah**



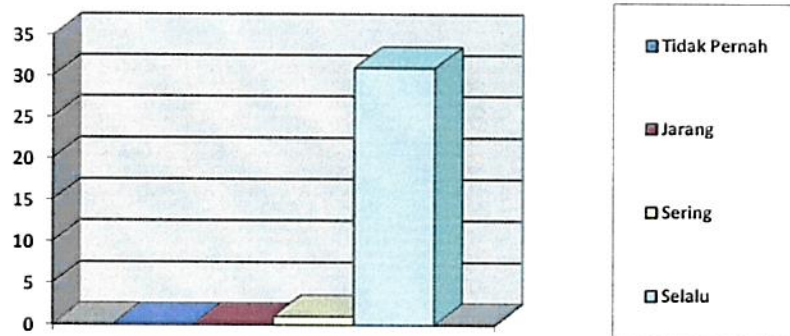
### 3.2.7. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index **3,969**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan **tidak menerapkan adanya biaya tambahan.**

**Tabel 14.**

**Indeks pada indikator tambahan biaya**



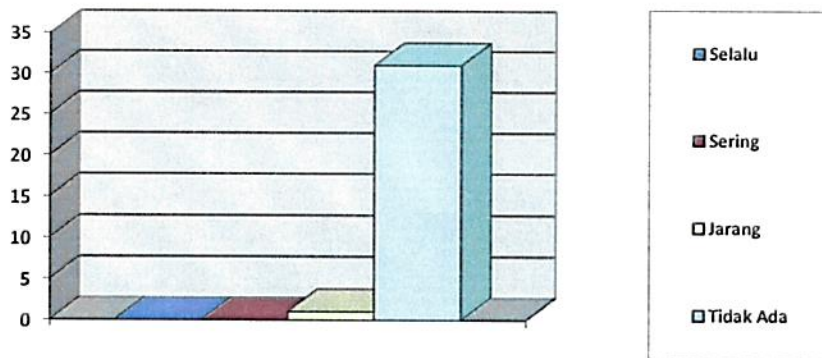
**3.2.8. Indikator Percaloan**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index **3,969**

Indeks dapat diartikan kinerja Satuan Kerja pada pengadilan transparan dalam pengelolaan pembiayaan

**Tabel 16.**

**Indeks pada indikator Percaloan**



**3.2.9. Indikator Isu KKN**

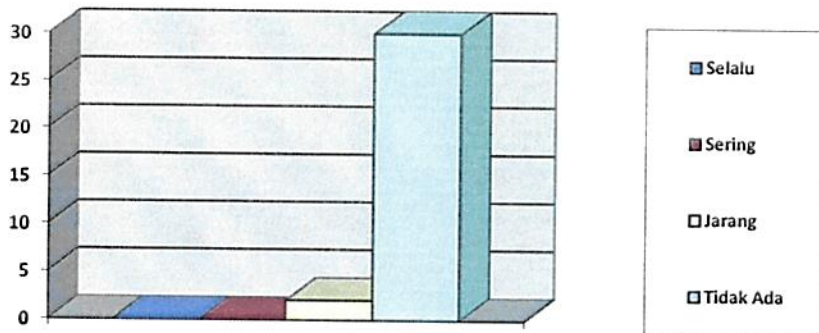
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Isu KKN ini menunjukkan hasil pada index **3,938**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja

pada pengadilan **bersih dari tindakan Percaloan.**

**Tabel 17.**

**Indeks pada indikator Isu KKN**



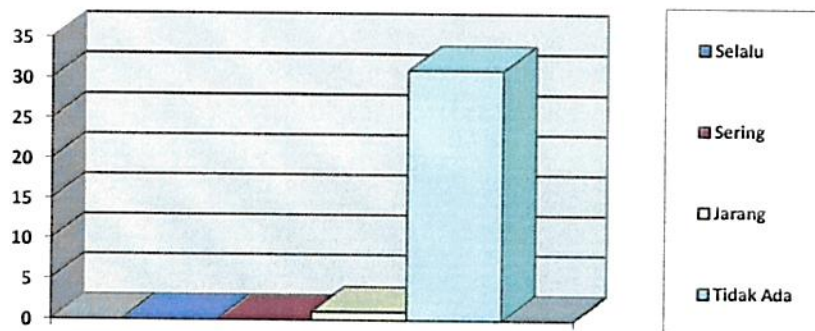
**3.2.10. Indikator Prosedur diluar Persidangan**

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Prosedur diluar Persidangan ini menunjukkan hasil pada index **3,969**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan **bersih dari perbuatan curang.**

**Tabel 18.**

**Indeks pada indikator Prosedur diluar Persidangan**

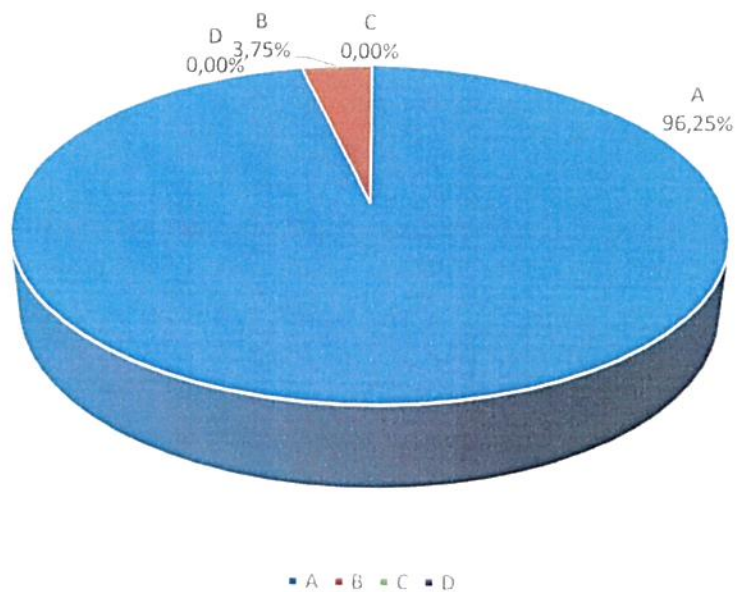


### 3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi **Satuan Kerja Pengadilan Negeri Metro Kelas IB sebesar 3,963**

Tabel 19.

#### Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan **Negeri Metro**



Indeks **3,963** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka Persepsi **4**

**Tabel 20.**  
**Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan**  
**Negeri Metro Kelas IB**

<b>NILAI PERSEPSI</b>	<b>NILAI INTERVAL</b>	<b>NILAI INTERVAL KONVERSI IPK</b>	<b>MUTU</b>	<b>KINERJA</b>
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

**3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan**

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Metro

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

**Tabel 21.**  
**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan**  
**Satuan Kerja pada pengadilan**

<b>No</b>	<b>Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan</b>
1	sdh baikl
2	PEMBAYARANNYA PAKE VIRTUAL AKUN
3	Membantu sekali
4	Lebih mudah pakai e berpadu
5	aplikasinya loding terus
6	
7	
8	
9	



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan **Negeri Metro** diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan **Negeri Metro** memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3,963 atau** masuk pada kategori Persepsi **4**

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,969
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,969
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,969
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,938
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,969
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,969
7. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,969
8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,969
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,938
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,969

#### **4.2. Rekomendasi**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Metro tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,963 atau masuk pada persepsi Bersih dari korupsi Namun tetap terus ditingkatkan.



	Triwulan I																	
	Pelaksanaan Survey II																	
	Perhitungan Indeks Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan Survey Triwulan II																	
	Monev dan Tindak Lanjut Survey Triwulan II																	
4	Pelaksanaan Survey Triwulan III																	
5	Perhitungan Indeks Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan Survey Triwulan III																	
6	Monev dan Tindak Lanjut Survey Triwulan III																	
7	Pelaksanaan Survey Triwulan IV																	
8	Perhitungan Indeks Pembuatan Laporan dan Publikasi Pelaksanaan Survey Triwulan IV																	
9	Monev dan Tindak Lanjut Survey Triwulan IV																	

C. Tahapan Survei

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan

pengolahan dan penyajian hasil survey yang mencakup Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun Instrumen Survei;
2. Menentukan besaran dan Teknik penarikan sampel;
3. Menentukan responden
4. Melaksanakan survey
5. Menyajikan dan melaporkan hasil.

#### D. Penggunaan Aplikasi Survei

##### 1. Penyiapan Aplikasi

Satuan kerja selaku unit pelayanan publik menyiapkan minimal 1 komputer atau media elektronik lain yang dapat digunakan untuk melaksanakan survey secara elektronik. petugas dari unit pelayanan publik membuka aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada komputer/ media elektronik lainnya yang sudah disiapkan dengan tahapan:

- Memastikan bahwa komputer yang digunakan untuk melaksanakan survei sudah terkoneksi dengan internet;
- Membuka browser/ peramban halaman website;
- Membuka alamat website:  
[http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/\[kode\\_s atker\]](http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/[kode_s atker])
- Jika berhasil membuka aplikasi maka akan tampil halaman Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Anti Korupsi

##### 2. Pengisian Survey

Responden dapat memilih salah satu survei yang sudah disediakan oleh unit layanan publik. terdapat beberapa tahapan, antara lain:

- Data Responden  
Berupa isian data pribadi responden
  - Jenis Layanan  
Berupa isian jenis layanan yang diterima oleh responden
-

- Kuisisioner

Berupa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh unit layanan publik

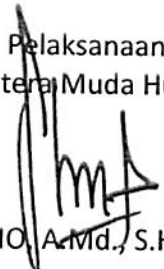
- Kesan dan Pesan

Berupa isian bebas kesan dan pesan

Demikian rencana kegiatan ini kami buat sebagai acuan dalam pelaksanaan Indeks KEPUASAN MASYARAKAT (SKM).

Metro, 10 Januari 2024

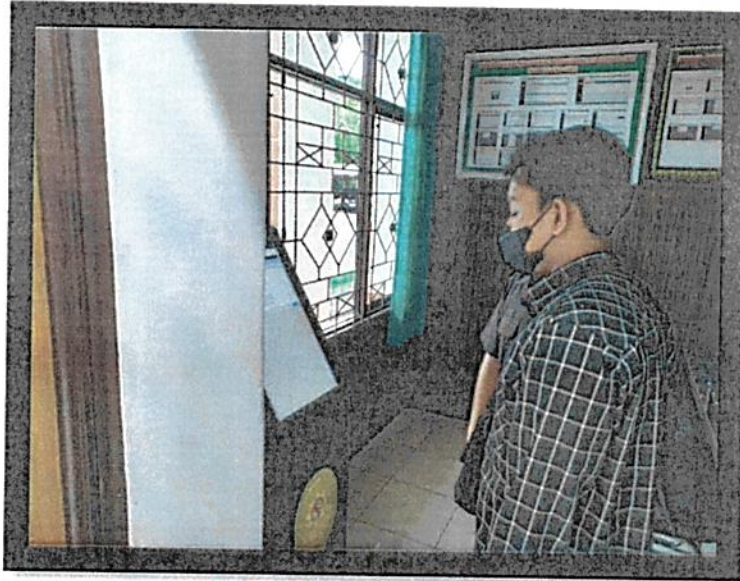
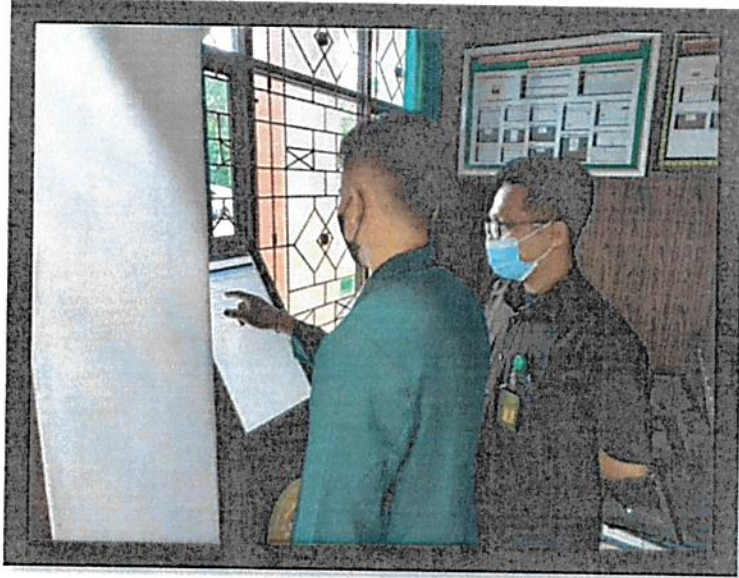
Pelaksanaan,  
Panitera Muda Hukum

  
ISMONO, A.Md., S.H., M.H.

Koordinator SKM

  
Lia Puji Astuti, S.H.

Pengisian Survey SKM pada aplikasi SiSuper





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINANG  
PENGADILAN NEGERI METRO**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 65 Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat  
Kota Metro, Lampung 34125. www.pn-metro.go.id, admin@pn-metro.go.id

Nomor : 367-b/PN.W9-U2/OT.01.1/1/2024

Metro, 02 April 2024

Lampiran : -

Hal : **Undangan Rapat**

Kepada,

Yth. Bapak/Ibu .....

di-

Metro

Sehubungan dengan akan dilaksan akan Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

Triwulan II, dengan ini mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 03 April 2024

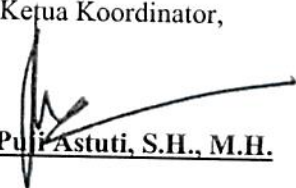
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai

Acara : Rapat Pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

Tempat : Ruang Rapat

Atas perhatian saudara, diucapkan terima kasih.

Ketua Koordinator,

  
Lia Puji Astuti, S.H., M.H.



# PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB

Jl.Sutan Sjahrir No. 65 Kota Metro

Telp. (0725) 41833 – 41624 Fax. (0725) 41624

Website : [www.pn-metro.go.id](http://www.pn-metro.go.id); E-mail : [pn.klasib.metro@gmail.com](mailto:pn.klasib.metro@gmail.com)

<b>HARI / TANGGAL RAPAT</b>	Rabu / 03 April 2024	<b>KETERANGAN LAMPIRAN</b>	
<b>LOKASI RAPAT</b>	Ruang Rapat	<input checked="" type="checkbox"/>	DAFTAR HADIR
<b>MULAI WAKTU RAPAT</b>	09.00 WIB <b>SELESAI</b> 10.30 WIB	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNAL MEMO
<b>POKOK BAHASAN RAPAT</b>	1 Rapat Survei IPK	Beri Tanda berikut <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIMPINAN RAPAT</b>	1 Lia Puji Astuti, S.H., M.H.		
<b>MODERATOR</b>	2 Ismono, S.H., M.H.		
<b>NOTULEN</b>	3 Cacah Firmansyah		

## BAHASAN MATERI RAPAT

### CATATAN

### KETERANGAN

- Pengantar Koordinator :  
Assalamualaikum Wr. Wb.  
Siang ini atas limpahan rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga hari ini kita dapat melaksanakan rapat IPK. Sebelum rapat Survei Indeks Persepsi Korupsi (SPAK) Triwulan I ini, mari kita membahas apa yang menjadi rencana survai SPAK Pengadilan Negeri Metro
- Berdasarkan surat ketua Pengadilan Negeri Metro Kelas IB tentang Pembentukan Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi dan telah dijadwalkan sebelumnya pelaksanaan survey Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK).
- Responden didapat dari pemohon atau pengunjung yang berkepentingan melalui aplikasi SISUPER Dirjen Badilum.
- Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Mahkamah Agung RI Nomor 1365/DJU/HM.02.3/5/2021 tentang pedoman pelaksanaan survei dan tata





## PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB

Jl.Sutan Sjahrir No. 65 Kota Metro

Telp. (0725) 41833 – 41624 Fax. (0725) 41624

Website : [www.pn-metro.go.id](http://www.pn-metro.go.id); E-mail : [pn.klasib.metro@gmail.com](mailto:pn.klasib.metro@gmail.com)

cara penggunaan aplikasi survei pelayanan elektronik (SISUPER) pada direktorat jendral badan peradilan umum dan peradilan di bawahnya maka survey indek persepsi anti korupsi dilakukan dengan menggunakan aplikasi tersebut

- Merujuk pada surat keputusan Dirjen MA RI tersebut diatas kegiatan survei dilakukan untuk Triwulan I
- Penyusunan Jadwal/Agenda kegiatan Survey dari Triwulan I. sampai dengan Triwulan IV Periode Survey 2024
- Melakukan monitoring, Evaluasi dan Rekomendasi setelah hasil survey terlaksana
- Penutup :  
Sekian rapat survey indeks persepsi korupsi (SPAK) hari ini. Diharapkan kerjasamanya. Terimakasih untuk tugas yang sudah dilakukan. Wassalamualaikum  
Wr. Wb.

### DIBUAT NOTULEN

NAMA LENGKAP &  
TTD

Cacah Firmansyah

### DIPERIKSA

NAMA LENGKAP & TTD

Lia Puji A , S.H., M.H.

### DISAHKAN

NAMA LENGKAP

Lia Puji Astuti,  
S.H., M.H.

TANDA  
TANGAN

Foto Rapat



Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam
1 Anik	LAMPUNG	43 Tahun	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 18 Maret 2024
2 ANDRIYAN	LAMPUNG	45 Tahun	SMUSWASTA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3 18 Maret 2024
3 JANSORI	LAMPUNG	63 Tahun	SMUPOLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 8 Maret 2024
4 HAYUMI	LAMPUNG	59 Tahun	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 8 Maret 2024
5 MUSLIMIN	LAMPUNG	46 Tahun	S3LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 8 Maret 2024
6 Yatri	LAMPUNG	32 Tahun	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 4 Maret 2024
7 Liza	LAMPUNG	22 Tahun	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 27 Februari 2024
8 RAHMAT HIDAYAT	LAMPUNG	28 Tahun	SMUPOLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 27 Februari 2024
9 Feri	LAMPUNG	36 Tahun	SMUPOLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 27 Februari 2024
10 Musnat	LAMPUNG	28 Tahun	S1POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 27 Februari 2024
11 Fara	LAMPUNG	23 Tahun	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 27 Februari 2024
12 Fara Annisa	LAMPUNG	23 Tahun	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 27 Februari 2024
13 Riski	LAMPUNG	23 Tahun	SDLAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 27 Februari 2024
14 Kiki	LAMPUNG	27 Tahun	SMUWIRSAUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 26 Februari 2024
15 Ari W	LAMPUNG	53 Tahun	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 26 Februari 2024
16 Pari Purna	LAMPUNG	27 Tahun	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 23 Februari 2024
17 Panca	LAMPUNG	53 Tahun	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 23 Februari 2024
18 Natasha	LAMPUNG	31 Tahun	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 15 Februari 2024
19 Theresia	LAMPUNG	29 Tahun	S1TENAGA KONTRAK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 13 Februari 2024
20 Yuzar	LAMPUNG	52 Tahun	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 1 Februari 2024
21 Nanik	LAMPUNG	52 Tahun	SMUWIRSAUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 29 Januari 2024
22 Tita	LAMPUNG	30 Tahun	SMUSWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 25 Januari 2024
23 Ari Aprihatin	LAMPUNG	32 Tahun	S1TENAGA KONTRAK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 25 Januari 2024
24 Assyafau Husnul Fahrurnisa	LAMPUNG	25 Tahun	S1TENAGA KONTRAK	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 25 Januari 2024
25 Agus Susilo	LAMPUNG	56 Tahun	SMUWIRSAUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 25 Januari 2024
26 82178740577	LAMPUNG	52 Tahun	SMUWIRSAUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 22 Januari 2024
27 Dovi	LAMPUNG	35 Tahun	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 22 Januari 2024
28 NURLAELI	LAMPUNG	35 Tahun	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 18 Januari 2024
29 YUZAR	LAMPUNG	55 Tahun	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 18 Januari 2024
30 Roby	LAMPUNG	24 Tahun	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 16 Januari 2024
31 Yamin	LAMPUNG	58 Tahun	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 5 Januari 2024
32 Ramson	LAMPUNG	53 Tahun	S1SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 3 Januari 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	31	31	30	31	31	31	31	30	31
1	1	1	2	1	1	1	1	2	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32

U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Keterangan
3,969	3,969	3,969	3,938	3,969	3,969	3,969	3,969	3,938	3,969	39,625
0,397	0,397	0,397	0,394	0,397	0,397	0,397	0,397	0,394	0,397	3,963



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPURING  
PENGADILAN NEGERI METRO

Jalan Sutan Syahrir Nomor 65 Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat  
Kota Metro, Lampung 34125. www.pn-metro.go.id, admin@pn-metro.go.id

Nomor : /PAN.W9.U2/HK.01/4/2024

April 2024

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengguna Layanan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Metro Triwulan IV Periode Oktober-Desember 2023

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungpurung

di-

Bandar Lampung

Dengan hormat,

Merujuk pada Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Umum nomor 520/DJU/PS.02/4/2016, tanggal 13 April 2016 tentang Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Metro.

Metrode yang digunakan dalam kegiatan Survei ini adalah pengisian kuisisioner secara online melalui aplikasi SiSuper random kepada responden. Responden Survei tersebut meliputi para pencari keadilan di Pengadilan Negeri metro dan pengguna layanan lainnya yang berasal dari Kejaksaan Negeri, Kepolisian, Pengacara dan instansi terkait lainnya yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro. Proses pengumpulan data pada Survei tersebut dilaksanakan sejak 1 Oktober s/d 31 Desember 2023 melalui aplikasi survey pelayanan elektronik badilum.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Metro, 30 Januari 2024

An. Ketua,  
Panitera

SUHAI DI AGUS

Tembusan:  
- Arsip.



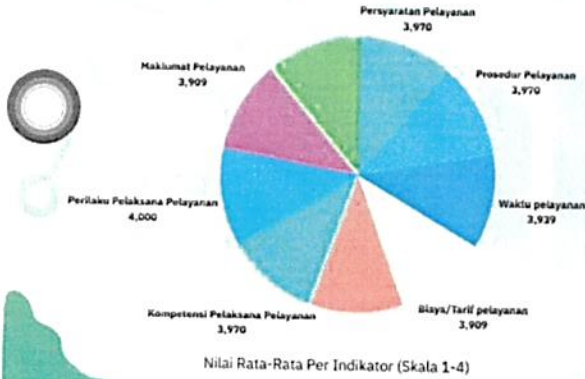


← Posts



pengadilan\_negeri\_metro

**HASIL SURVEY INDEKS  
KEPUASAN MASYARAKAT**  
TRIWULAN I 2024  
(JANUARI - MARET 2024)  
**NILAI INDEKS**  
**3,95 / 98,74 %**



3 likes

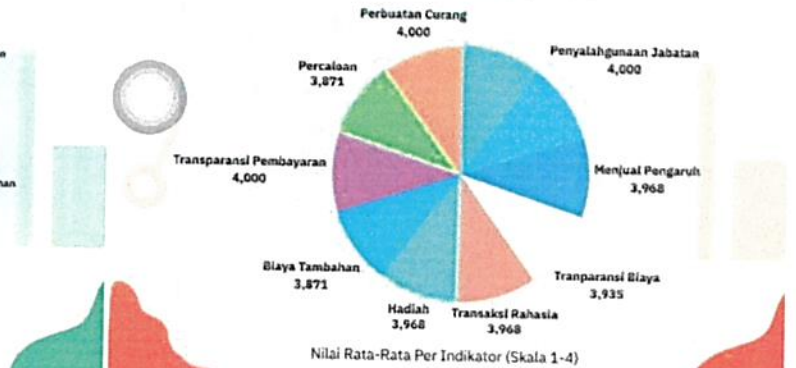
pengadilan\_negeri\_metro Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi... more  
3 days ago

← Posts



pengadilan\_negeri\_metro

**HASIL SURVEY INDEKS PERSEPSI  
ANTI KORUPSI**  
TRIWULAN I 2024  
(JANUARI - MARET 2024)  
**NILAI INDEKS**  
**3,96 / 99,06 %**



3 likes

pengadilan\_negeri\_metro Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi... more  
3 days ago



pengadilan\_negeri\_metro



pengadilan\_negeri\_metro









**PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB**  
Jalan Sutan Sjahrir No. 65 Kota Metro  
Telp. (0725) 41833 – 41624 Fax. (0725) 41624  
Website : [www.pn-metro.go.id](http://www.pn-metro.go.id); E-mail : [pn.klasib.metro@gmail.com](mailto:pn.klasib.metro@gmail.com)

---

Metro, 22 April 2024

**MONITORING, EVALUASI DAN REKOMENDASI  
TERHADAP SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PENGADILAN  
NEGERI METRO KELAS IB  
( SURVEI SPAK JANUARI - MARET 2024 TRIWULAN I)**

Monitoring, Evaluasi dan Rekomendasi dan tindak lanjut (*Feedback*) hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (*Corruption Perception Index*) yang telah dilaksanakan Tim Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi atas pelayanan di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB Periode **JANUARI - MARET 2024**.

Indeks Persepsi Anti Korupsi atau SPAK adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dengan cara mengisi kuisioner online pada aplikasi SISUPER Dirjen Badilum. Pengadilan Negeri Metro Kelas IB merupakan salah satu unit pelayanan masyarakat di bidang hukum yang berkewajiban melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Pelaksanaan survey SPAK yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB merupakan kegiatan rutin dalam rangka upaya menjaga kualitas mutu pelayanan publik di Pengadilan Negeri Metro. Berdasarkan hal tersebut setiap 3 bulan Pengadilan Negeri Metro melakukan survey Indeks Persepsi Korupsi. Ada 10 indikator yang menjadi dasar pertanyaan survei yaitu :

1. Manipulasi Peraturan
  2. Penyalahgunaan Jabatan
  3. Menjual Pengaruh
  4. Transparansi Biaya
  5. Transaksi Rahasia
  6. Biaya Tambahan
  7. Hadiah
  8. Transparansi Pembayaran
  9. Percaloan
  10. Perbuatan Curang
-

#### A. Analisis

Survei dilakukan kepada responden dari pengguna unit layanan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB berasal dari pihak Mahasiswa/Pelajar, Masyarakat, Advokat dan Instansi Lain yang berhubungan dengan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB. Nilai rata-rata yang diperoleh dari Indeks Persepsi Anti Korupsi dapat dilihat pada table berikut :

##### Nilai Rata-rata yang diperoleh dari SPAK TRIWULAN IV JANUARI - MARET 2024 Pada Pengadilan Negeri Metro Kelas IB

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR
1.	Manipulasi Peraturan	3,969
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3,969
3.	Menjual Pengaruh	3,969
4.	Transparansi Biaya	3,938
5.	Transaksi Rahasia	3,969
6.	Biaya Tambahan	3,969
7.	Hadiah	3,969
8.	Transparansi Pembayaran	3,969
9.	Percaloan	3,938
10.	Perbuatan Curang	3,969
	<b>Rata-Rata</b>	3,963

Nilai Rata-rata dari unsur pelayanan adalah 3.963 dengan nilai SPAK maka mutu pelayanan dapat dikategorikan "A" dengan kinerja Bersih dari korupsi.

Berikut 3 nilai unsur terendah dari hasil survey :

No.	Unsur	Nilai
1	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	126
2	Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?	126
3	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	127

#### B. Tindakan/Solusi Kongkrit yang Diberikan

Tindak lanjut atas hasil survei yang dilakukan diharapkan dapat memperbaiki integritas yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Metro Kelas IB kepada masyarakat pencari keadilan sehingga meningkatkan kualitas pelayanan.

1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?

Saran dan Rekomendasi :

Agar selalu mempublikasi Biaya Panjar/tarif di ruang publik dan di website Pengadilan Negeri Metro dan dilakukan **pembaharuan secara berkala** jika terdapat perubahan”

2. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?

Saran dan Rekomendasi :

Agar melakukan kampanye anti KKN di lingkungan Pengadilan Negeri, memasang banner anti korupsi, dan melakukan briefing kepada petugas pelayanan agar terhindar dari praktek KKN.

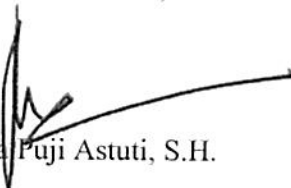
3. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?

Saran dan Rekomendasi :

Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memberikan pelayanan kepada pengguna pengadilan dengan berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur SOP yang berlaku dan Standar Pelayanan,

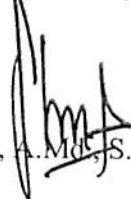
Demikian Monitoring dan evaluasi dari hasil survey yang telah dilakukan oleh tim survei Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

Koordinator,



Lia Puji Astuti, S.H.

Belaksana,



Ismono, A.Md., S.H., M.H.

**TINDAK LANJUT  
TERHADAP HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)  
PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB  
( SURVEI SPAK TRIWULAN I)**

**A. ANALISIS**

Setelah dilakukan survey kepada responden dari pengguna unit layanan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB berasal dari pihak Mahasiswa/Pelajar, Masyarakat, Advokat dan Instansi Lain yang berhubungan dengan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB. Telak dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil survey 3 unsur nilai terendah sebagai berikut :

No.	Unsur	Nilai
1	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	126
2	Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?	126
3	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	127

**B. SARAN DAN REKOMENDASI**

1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?

Saran dan Rekomendasi :

Agar selalu mempublikasi Biaya Panjar/tarif di ruang publik dan di website Pengadilan Negeri Metro dan dilakukan **pembaharuan secara berkala** jika terdapat perubahan”

2. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan?

Saran dan Rekomendasi :

Agar melakukan kapanye anti KKN di lingkungan Pengadilan Negeri, memasang banner anti korupsi, dan melakukan briefing kepada petugas pelayanan agar terhindar dari praktek KKN.

3. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?

Saran dan Rekomendasi :

Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memberikan pelayanan kepada pengguna pengadilan dengan berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur SOP yang berlaku dan Standar Pelayanan,

### C. TIDAK LANJUT HASIL SURVEY

Tindak lanjut dari saran dan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi nilai 3 unsur terendah :

1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?

**Tindak Lanjut :**

Mempublikasi Biaya Panjar/tarif di ruang publik dan di website Pengadilan Negeri Metro dan dilakukan pembaharuan secara berkala jika terdapat perubahan”



2. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?

**Tindak Lanjut :**

Melakukan kampanye anti KKN di lingkungan Pengadilan Negeri, memasang banner anti korupsi, dan melakukan briefing kepada petugas pelayanan agar terhindar dari praktek KKN.



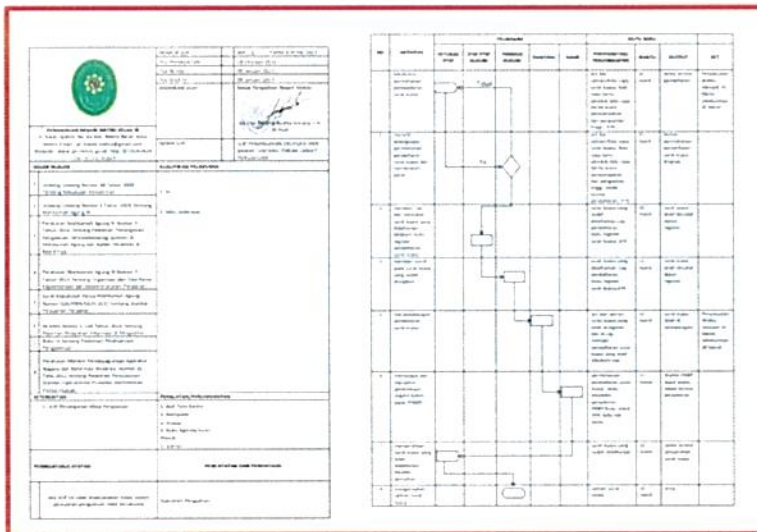
Pemasangan banner anti gratifikasi dan slogan anti Korupsi

3. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?

**Tindak Lanjut :**

Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memberikan pelayanan kepada pengguna pengadilan dengan berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur SOP yang berlaku dan Standar Pelayanan,

Tersedia SOP di Setiap Meja Pelayanan dan menjadi acuan prosedur pelayanan



Standar Pelayanan



Koordinator,

Lia Nuji Astuti, S.H.

Metro, 7 Mei 2024  
Pelaksana,

Ismono, A.Md., S.H., M.H.